

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL  
DALAM PEMBERIAN KREDIT UMKM UNTUK  
MEMINIMALKAN TERJADINYA KREDIT  
MACET PADA PT. BANK BTPN, Tbk  
UNIT DELI TUA**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**DONI HENDRA SIHOMBING**

**NPM : 10 833 0172**



**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2016**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)23/2/24

**LEMBAR PENGESAHAN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**Judul** : Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Dalam Pemberian Kartu Kredit UMKM Untuk Meminimalkan Terjadinya Kredit Macet Pada PT. Bank BTPN,Tbk Unit Deli Tua

**Nama Mahasiswa:** Doni Hendra Sihombing

**No. Stambuk** : 10.833.0172

**Jurusan** : Akuntansi

**Menyetujui :**

**Komisi Pembimbing**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
(Hj.Sari Bulan Tambunan, SE, MMA)

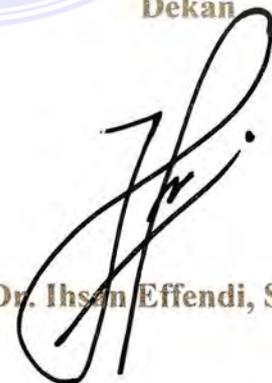
  
(M.Idris Dalimunthe, SE, M.Si)

**Mengetahui :**

**Ketua Jurusan**

**Dekan**

  
(Linda Lores, SE, M.Si)

  
(Dr. Ihsan Effendi, SE, M.Si)

**Tanggal Lulus :**

**2016**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/2/24

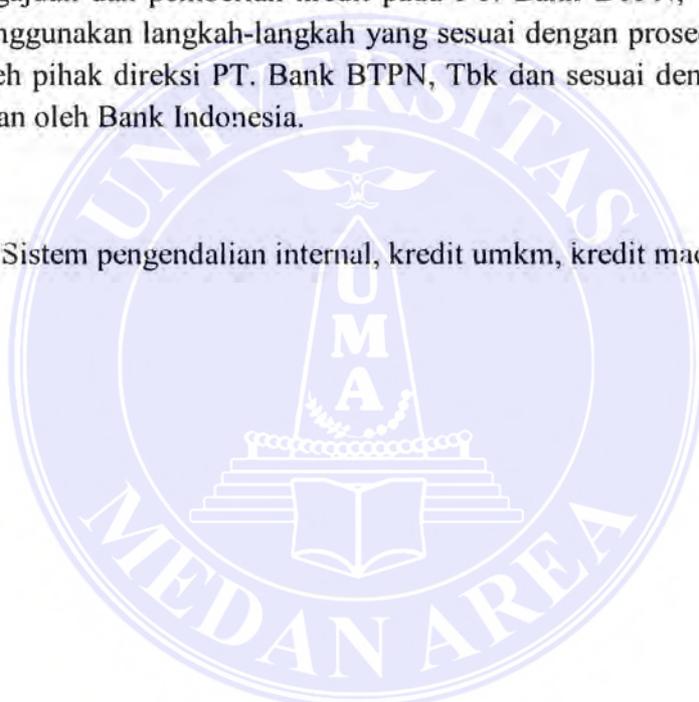
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)23/2/24

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan sistem pengendalian internal pada prosedur pemberian kredit umkm pada PT.Bank BTPN Tbk Unit Deli Tua, apakah prosedur tersebut telah sesuai dengan sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan oleh pihak direksi PT. Bank BTPN Tbk. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Analisis data yang digunakan adalah dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasikan, Menganalisis data dan membandingkan data yang ada dengan teori yang relevan, sehingga akan memberikan hasil yang kongkrit pada permasalahan. Dari hasil analisis pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa prosedur pengajuan dan pemberian kredit pada PT. Bank BTPN, Tbk Unit Deli Tua telah menggunakan langkah-langkah yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak direksi PT. Bank BTPN, Tbk dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

**Kata kunci :** Sistem pengendalian internal, kredit umkm, kredit macet



## KATA PENGANTAR

Pertama sekali penulis tidak lupa mengucapkan segala puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmatNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini pada waktunya.

Penulisan skripsi ini merupakan syarat bagi penulis untuk menyelesaikan program studi Strata 1 dan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima bimbingan, masukan, serta nasehat yang sangat berguna. Maka dengan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada kedua orang tua tercinta, yang senantiasa memberikan dorongan dan pengorbanan baik moril maupun materil selama penulis menjalani masaperkuliahannya sampai dengan selesai.
2. Bapak Prof.Dr.H.Ali Yakub Matondang, Sag, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Bapak Prof.Dr.H.Ihsan Efendi, SE, Mec, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
4. Ibu Linda Lores, SE, Msi, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Medan Area.
5. Ibu Hj. Saribulan Tambunan, SE, MMA, selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan saran, bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.

6. Bapak M.Idris Dalimunthe, SE, MSi, selaku pembimbing 2 yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga serta memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak pimpinan PT. Bank BTPN Unit Deli Tua yang telah memberikan pengarahan serta bantuan dalam hal penyediaan data yang penulis perlukan untuk penulisan skripsi ini.
8. Kepada teman-teman stambuk 2010 jurusan akuntansi yang telah memberikan bantuan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan, baik isi, susunan dan bahasa penulisan. Untuk itu penulis dengan tangan terbuka menerima kritikan dan saran-saran yang sehat dari para pembaca agar kiranya skripsi yang sederhana ini bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya.

Medan Oktober 2016

Penulis

(Doni Hendra Sihombing)

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat penelitian .....	5
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>6</b>
A. Teori-teori .....	6
1. Pengertian system pengendalian .....	6
2. Tujuan system pengendalian .....	7
3. Unsur-unsur system pengendalian internal .....	8
4. Pengertian kredit .....	9
5. Tujuan pemberian kredit .....	10
6. Jenis-jenis kredit .....	10

7. Prinsip-prinsip pemberian kredit .....	14
8. Pengertian kredit macet .....	16
9. Pengertian usaha mikro, kecil dan menengah .....	17
10. Penyebab kredit macet .....	18
11. Mencegah dan mengatasi kredit macet .....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>24</b>
A. Jenis penelitian .....	24
B. Lokasi penelitian .....	24
C. Waktu penelitian .....	24
D. Jenis data .....	25
E. Sumber data .....	25
F. Teknik pengumpulan data .....	25
G. Responden .....	26
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>27</b>
A. Sejarah Singkat .....	27
B. Visi dan misi PT. Bank BTPN, Tbk .....	29
C. Struktur organisasi PT. Bank BTPN, Tbk Unit Deli Tua .....	29
D. Deskripsi jabatan .....	30
E. Kegiatan pokok PT. Bank BTPN, Tbk .....	33
F. Kegiatan pokok PT. Bank BTPN Unit Deli Tua .....	34
G. Sistem pengendalian internal pemberian kredit PT. Bank BTPN Unit Deli Tua .....	36

H. Prosedur pemberian kredit PT. Bank BTPN Unit Deli Tua .....	44
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
A. Kesimpulan .....	53
B. Saran .....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>56</b>



## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 4.1. Struktur Organisasi PT. Bank BTPN Tbk Unit Deli Tua .....	29
Gambar 4.2. Prosedur Pemberian Kredit UMKM Pada PT. Bank BTPN Tbk Unit Deli Tua .....	52



## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1. Waktu Penelitian Skripsi .....	24



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dunia perbankan dan dunia usaha ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Semakin tumbuh dan berkembangnya dunia perbankan di Indonesia adalah sebagai akibat dari semakin tumbuh dan berkembangnya dunia usaha di Indonesia. Begitu pula sebaliknya, semakin tumbuh dan berkembangnya dunia usaha di Indonesia tidak terlepas dari adanya dukungan yang diberikan oleh perbankan kepada mereka. Dimana dalam hal ini bank pihak yang selalu aktif memberikan modal usaha melalui kredit yang diberikannya dan mendapatkan keuntungan melalui bunga kredit yang diberikannya tersebut.

Salah satu sektor usaha yang saat ini sangat berkembang di Indonesia adalah sektor usaha dibidang usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Dimana lebih dari lima puluh persen pelaku usaha yang ada di Indonesia adalah pelaku yang bergerak disektor UMKM. Melihat kenyataan yang ada tersebut, pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah selalu berusaha membuat berbagai kebijakan atau terobosan untuk membantu dunia usaha khususnya UMKM agar semakin tumbuh dan berkembang kedepannya.

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Bank Indonesia adalah dengan diterbitkannya *Peraturan Bank Indonesia No 17/12/2015 tentang pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan usaha mikro kecil dan menengah*. Dalam kebijakan tersebut diatas sangat jelas terlihat jika pemerintah sangat memperhatikan

keberlangsungan hidup para pelaku UMKM. Pemerintah melalui Bank Indonesia mewajibkan seluruh bank umum untuk mengalokasikan minimal sebesar dua puluh persen dari total seluruh kreditnya untuk sektor usaha UMKM.

Selain kewajiban tersebut diatas pemerintah melalui Bank Indonesia juga mewajibkan Bank umum untuk melakukan pengawasan dan pelatihan usaha kepada pelaku UMKM yang menjadi debiturnya agar usahanya menjadi semakin berkembang sehingga debitur tersebut mampu memenuhi kewajibannya kepada bank melalui pembayaran angsuran pokok dan bunganya.

Merespon kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah diatas, PT. Bank BTPN, Tbk sebagai salah satu bank umum di Indonesia menanggapinya dengan cermat. PT. Bank BTPN, Tbk yang selama ini dikenal sebagai bank yang menjadikan umkm sebagai target pasarnya melalui unit usaha BTPN Mitra Usaha Rakyat (MUR) semakin giat dan bersemangat dalam memberikan kredit kepada sektor umkm. PT. Bank BTPN, Tbk selalu berupaya untuk memberikan kemudahan pemberian kredit kepada setiap masyarakat. Fenomena kemudahan pemberian kredit oleh PT. Bank BTPN, Tbk menimbulkan sebuah pertanyaan: Apakah PT. Bank BTPN, Tbk telah menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan kebijakan perkreditan Bank Indonesia.

Namun ditengah usahanya dalam meningkatkan pemberian kredit kepada sektor umkm PT. Bank BTPN, Tbk juga tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit tersebut. Jangan sampai ditengah banyaknya kredit yang diberikan tersebut tidak diimbangi dengan kualitas pemberian kredit yang sehat yaitu dengan besarnya angka kredit macet ditimbulkan. Besarnya angka

kredit macet yang timbul jelas akan memberikan dampak yang buruk bagi perekonomian negara dan juga dapat mengancam keberlangsungan hidup bank itu sendiri.

Untuk itu, dengan mengacu pada SK Dir BI No 27/162/Dir Tanggal 31 Maret 1995 maka direksi PT Bank BTPN Tbk Membuat suatu kebijakan perkreditan yang jelas yang digunakan sebagai pedoman oleh karyawan PT. Bank BTPN, Tbk dalam memberikan kredit kepada masyarakat. Kebijakan perkreditan yang dibuat tersebut meliputi : sistem pengendalian internal pemberian kredit dan prosedur pemberian kredit.

Dalam kebijakan perkreditan PT Bank BTPN Tbk ini terlihat jelas aturan – aturan yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh seluruh karyawan PT Bank BTPN Tbk guna mendukung kinerja mereka dalam memberikan kredt.

Sistem pengendalian internal yang efektif dapat membantu manajemen bank dalam mengelola dan menjaga aset, menjamin tersedianya laporan keuangan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengurangi resiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Tersedianya sistem pengendalian bank yang andal dan efektif menjadi tanggungjawab dari manajemen bank.

Pemberian kredit kepada debitur yaitu melalui suatu proses pengajuan kredit dan proses analisis pemberian kredit terhadap kredit yang diajukan oleh debitur. Bank dapat melakukan analisis permohonan kredit debitur apabila persyaratan yang telah ditetapkan oleh bank telah dilengkapi oleh debitur. Selain kelengkapan

data pendukung pemohon kredit, bank juga melakukan penilaian kelengkapan dan kebenaran informasi dari pemohon kredit dengan cara melakukan wawancara dan kunjungan (survey) kerumah atau tempat usaha dari sipemohon kredit dan melihat langsung kondisi agunan yang diberikan oleh sipemohon kredit tersebut.

Berdasarkan keadaan yang terjadi diatas, penulis merasa tertarik dan mencoba untuk membahas dan menganalisa sistem pengendalian internal pada pemberian kredit umkm yang dilakukan oleh pihak PT. Bank BTPN, Tbk dengan mengangkat judul penelitian: **ANALISIS PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT UMKM UNTUK MEMINIMALKAN TERJADINYA KREDIT MACET PADA BANK PT. BTPN, Tbk UNIT DELI TUA.**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas,maka yang menjadi pokok permasalahan/perumusan masalah ada

1. Bagaimanakah prosedur pemberian kredit pada PT Bank BTPN, Tbk Unit Deli Tua dan Bagaimanakah sistem pengendalian internal dalam pemberian kredit pada PT Bank BTPN, Tbk Unit Deli Tua Untuk mencegah terjadinya kredit macet.

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui proses pemberian kredit yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan azas perkreditan yang sehat pada PT. Bank BTPN Unit Deli Tua.
2. Untuk mengetahui efektifitas sistem pengendalian internal pada poses pemberian kredit umkm pada PT. Bank BTPN Unit Deli Tua.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Bagi Perusahaan**

Sebagai bahan masukan atau bahan pertimbangan bagi manajemen dalam menyalurkan kredit kepada debitur dimasa yang akan datang.

### **2. Bagi Peneliti**

Sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area dan agar penulis dapat memahami dan menambah pengetahuan dibidang perkreditan.

### **3. Bagi Pihak Lainnya**

Penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat menambah pengetahuan dan informasi dibidang perkreditan dan juga sebagai sebagai bahan refrensi bagi peneliti selanjutnya yang membutuhkan informasi tentang perkreditan yang sesuai dengan penelitiannya.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Teori-Teori

##### 1. Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal merupakan bagian dari manajemen resiko yang harus dilaksanakan oleh setiap lembaga untuk mencapai tujuannya. Karena itu sistem pengendalian internal sangat dibutuhkan dalam sebuah lembaga, sehingga hal ini harus dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin kesinambungan dan kepercayaan pihak investor maupun masyarakat.

Menurut Mulyadi (2002:183) sistem pengendalian internal meliputi metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dilaksanakannya kebijakan manajemen. Menurut Halomoan (2012:200) sistem pengendalian internal suatu organisasi merupakan bentuk pengawasan yang paling utama yang diciptakan manajemen untuk memberikan jaminan yang memadai, agar tujuan organisasi dapat dicapai secara ekonomis, efisien dan efektif.

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal merupakan proses kebijakan atau prosedur yang dijalankan oleh dewan direksi, manajemen dan personel lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai mengenai keandalan laporan keuangan.

## 2. Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal dirancang dengan memperhatikan kepentingan manajer perusahaan dalam menyelenggarakan kegiatan operasional perusahaan dan juga memperhatikan aspek biaya yang harus dikeluarkan serta manfaat yang diharapkan.

Menurut Halomoan (2012:23) yang menjadi tujuan sistem pengendalian internal adalah :

### 1. Menjaga Kekayaan Organisasi

Penggunaan kekayaan perusahaan hanya melalui sistem otorisasi yang telah diterapkan pertanggungjawaban kekayaan perusahaan yang dicatat dibandingkan dengan kekayaan perusahaan yang sesungguhnya ada.

### 2. Mengecek Ketelitian Dan Keandalan Laporan Keuangan.

Manajemen bertanggungjawab dalam menyiapkan laporan keuangan bagi investor, kreditur dan pengguna lainnya. Manajemen mempunyai kewajiban hukum dan profesional untuk menjamin bahwa informasi telah disiapkan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

### 3. Efisiensi Dan Efektifitas

Sistem pengendalian internal dalam suatu organisasi dimaksudkan untuk mendorong penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mengoptimalkan tujuan organisasi.

#### 4. Mendorong Dipatuhinya Kebijakan Manajemen

Dengan adanya sistem pengendalian internal, maka diharapkan seluruh karyawan perusahaan dapat mematuhi dan menjalankan seluruh kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen perusahaan.

Sistem pengendalian internal tidak dimaksudkan untuk menghilangkan semua kemungkinan terjadinya kesalahan dan penyelewengan sama sekali, tetapi untuk menekan atau memperkecil terjadinya kesalahan dan penyelewengan dalam batasan-batasan yang layak, sehingga walaupun terjadi kesalahan atau penyelewengan dapat segera diketahui dan diatasi.

### 3. Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal terdiri dari beberapa unsur, namun hendaknya tetap diingat bahwa unsur-unsur tersebut tetap berhubungan dalam suatu sistem.

Menurut Committee of Sponsoring Organization of The Tradeway atau COSO (Baidaei:2005) unsur-unsur pokok sistem pengendalian internal adalah :

#### 1. Lingkungan Pengendalian

Suatu organisasi yang mempengaruhi kesadaran penguasaan (control consciousness) dari seluruh pegawainya. Lingkungan pengendalian ini merupakan dasar dari komponen lain karena menyangkut kedisiplinan dan struktur.

#### 2. Penaksiran Resiko

Adalah proses mengidentifikasi dan menilai resiko-resiko yang diadapi dalam mencapai tujuan. Setelah teridentifikasi, manajemen harus menentukan bagaimana mengelola atau mengendalikannya.

### 3. Aktivitas Pengendalian

Adalah kebijakan dan prosedur yang harus ditetapkan untuk meyakinkan manajemen bahwa semua arahan telah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian ini diterapkan pada semua tingkat organisasi dan pengolahan data.

### 4. Informasi Dan Komunikasi

Dua elemen yang dapat membantu manajemen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, manajemen harus membangun sistem informasi yang efektif dan tepat waktu.

### 5. Pemantauan

Suatu proses penilaian sepanjang waktu atas kualitas pelaksanaan pengendalian internal dan akan dilakukan perbaikan-perbaikan jika dianggap perlu.

## 4. Pengertian Kredit

Kredit berasal dari bahasa latin yang artinya percaya. Pemberi kredit percaya kepada sipenerima kredit bahwa kredit yang telah diberikannya kepada debitur pasti akan dikembalikan oleh sidebitur sesuai dengan perjanjian awal.

Menurut Kasmir (2008:96) kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang yang telah dipinjamnya.

Menurut Undang-undang No 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 1 tentang perubahan undang-undang no 7 tahun 1992 tentang perbankan : Kredit adalah penyediaan utang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain

yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya berikut dengan bunganya setelah jangka waktu yang telah disepakati.

## **5. Tujuan Pemberian Kredit**

Pemberian kredit biasanya mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit menurut Kasmir (2011:100) adalah :

### **1. Mencari Keuntungan**

Tujuan utama dari pemberian kredit adalah memperoleh keuntungan. Oleh pihak pemberi kredit, keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga dan juga biaya administrasi yang dibebankan kepada debitur.

### **2. Membantu Usaha Debitur**

Tujuan dari pemberian kredit lainnya adalah untuk membantu usaha debitur yang memerlukan tambahan dana untuk mengembangkan usahanya, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja.

### **3. Membantu Pemerintah**

Bagi pemerintah, semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak bank, maka akan semakin mempercepat perputaran roda perekonomian. Karena semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak bank maka akan semakin banyak pembangunan diberbagai sektor.

## **6. Jenis-jenis Kredit**

Ada beberapa jenis kredit yang dikemukakan oleh Kasmir dalam bukunya Manajemen Perbankan (2010:76) diantaranya adalah :

### **1. Dilihat Dari Segi Kegunaannya**

#### **a. Kredit Investasi**

Adalah kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha seperti untuk membangun pabrik baru atau untuk keperluan merehab pabrik. Penggunaan kredit investasi misalnya untuk membangun gedung/pabrik tempat usaha atau membeli mesin-mesin yang masa pemakaiannya relatif lebih lama dan dibutuhkan modal yang relatif lebih besar.

#### b. Kredit Modal Kerja

Adalah kedit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Misalnya untuk membeli bahan baku, membeli barang dagang, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan.

### 2. Dilihat Dari Segi Tujuan Kredit

#### a. Kredit Produktif

Adalah kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi. Kredit ini digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Sebagai contoh, kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang atau jasa. Kredit pertanian, yang nantinya akan menghasilkan produk pertanian, kredit pertambangan, yang menghasilkan barang tambang atau kredit industri yang menghasilkan barang industri.

#### b. Kredit Konsumtif

Adalah kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang atau jasa yang dihasilkan, karena memang tujuan penggunaannya hanya untuk keperluan pribadi dan tidak untuk keperluan

usaha. Contoh kredit konsumtif adalah kredit pemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, dan kredit perabotan rumah tangga.

c. Kredit Perdagangan

Adalah kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk menunjang aktivitas perdagangannya, seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering digunakan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dagangan dalam jumlah yang besar. Contoh kredit ini adalah kredit ekspor-impor.

3. Dilihat Dari Segi jangka Waktu

a. Kredit Jangka Pendek

Adalah kredit yang memiliki jangka waktu pelunasan kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk modal kerja.

b. Kredit Jangka Menengah

Adalah kredit yang jangka waktu pelunasannya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk kegiatan investasi.

c. Kredit Jangka Panjang

Adalah kredit yang jangka waktu pelunasannya lebih dari tiga tahun.

4. Dilihat Dari Segi Jaminan

a. Kredit Dengan Jaminan

Adalah kredit yang diberikan kepada debitur, dimana debitur harus terlebih dahulu memberikan sebuah barang atau sertifikat kepada pihak bank

sebagai jaminan sebelum ia menerima kredit. Dalam hal ini artinya setiap kredit yang disalurkan akan dilindungi minimal sama dengan nilai jaminan atau untuk kredit tertentu besarnya nilai jaminan harus lebih besar dari nilai kredit yang diberikan.

#### b. Kredit Tanpa Jaminan

Adalah kredit yang diberikan kepada debitur, dimana debitur tidak perlu memberikan sebuah jaminan kepada kreditur untuk memperoleh kredit tersebut. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lainnya.

### 5. Dilihat Dari Segi Sektor Usaha

#### 1. Kredit Pertanian

Adalah kredit yang diberikan kepada sektor pertanian atau perkebunan. Jangka waktu pinjaman dapat berupa jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

#### 2. Kredit Peternakan

Adalah kredit yang diberikan kepada usaha yang bergerak pada sektor peternakan. Jangka waktu pinjaman dapat berupa jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

#### 3. Kredit Industri

Adalah kredit yang diberikan kepada usaha yang bergerak pada sektor industri, baik industri kecil, industri menengah dan industri besar.

#### 4. Kredit Pertambangan

Adalah kredit yang diberikan kepada usaha yang bergerak dibidang pertambangan.

#### 5. Kredit Pendidikan

Adalah kredit yang diberikan untuk membangun fasilitas pendidikan dan dapat pula kredit untuk mahasiswa.

#### 6. Kredit Profesi

Kredit yang diberikan kepada kalangan-kalangan profesional seperti: guru, dosen, dokter, pengacara, dll.

#### 7. Kredit Perumahan

Adalah kredit yang diberikan untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan dan jangka waktu pinjaman yang diberikan adalah jangka waktu panjang.

#### 7. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Dalam proses pemberian kredit bank harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang benar. Artinya sebelum kredit diberikan maka pihak bank harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa kredit yang akan diberikan benar-benar akan kembali kepada pihak bank. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian permohonan kredit sebelum kredit diberikan. Penilaian kredit oleh pihak bank dapat dilakukan dengan berbagai cara melalui prosedur yang benar dan sungguh-sungguh

Menurut John Simon (2004:117) prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan adalah dengan menggunakan analisis 5 C. Penilaian dengan menggunakan analisis 5 C adalah sebagai berikut:

### 1. Character

Character merupakan watak atau sifat dari seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca atau mengetahui watak dari debitur dapat dilihat dari latar belakang kehidupannya. Seperti cara atau gaya hidupnya sehari-hari, keadaan keluarganya, hobinya atau jiwa sosialnya.

### 2. Capacity

Capacity adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan debitur dalam membayar atau mengembalikan kredit. Dari penilaian ini dapat terlihat kemampuan debitur dalam mengelola usahanya. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat potensi kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang telah diterimanya.

### 3. Capital

Untuk melihat efektif atau tidaknya penggunaan modal, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi). Analisis capital juga harus menganalisa sumber atau asal modal yang ada saat ini, termasuk persentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal milik sendiri dan berapa modal yang berasal dari pinjaman.

#### 4. Condition

Dalam melakukan penilaian permohonan kredit, hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial politik yang sedang terjadi saat ini dan prediksi untuk masa yang akan datang. Penilaian atau prospek usaha yang akan dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut akan menjadi kredit bermasalah relatif kecil.

#### 5. Collateral

Merupakan jaminan yang diberikan oleh debitur baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Nilai jaminan hendaknya harus lebih besar dari nilai kredit yang akan diberikan. Jaminan yang diberikan oleh debitur harus diteliti keabsahan dan kebenarannya agar jaminan tersebut dapat dipergunakan secepat mungkin.

### 8. Pengertian Kredit Macet

Dalam paket deregulasi pada bulan Mei tahun 1993 (PAKMEI 1993) diindonesia dikenal dua golongan kredit bank, yaitu kredit lancar dan kredit bermasalah. Kredit bermasalah digolongkan menjadi tiga jenis yaitu kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet. Kredit macet inilah yang sangat dikhawatirkan oleh pihak bank dan pemerintah, karena dapat mengganggu kondisi perekonomian makro, mengganggu keuangan bank, bahkan dapat mengakibatkan terhentinya kegiatan operasional bank.

Menurut Dahlan Siamat (1993:220) kredit macet adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi diluar kemampuan debitur.



Menurut Sutojo (1997:331) suatu kredit digolongkan kedalam kredit macet apabila :

1. Tidak dapat memenuhi kriteria kredit lancar, kredit kurang lancar dan kredit diragukan.
2. Dapat memenuhi kriteria kredit diragukan, tetapi setelah jangka waktu 21 bulan sejak masa penggolongan kredit diragukan belum terjadi pelunasan pinjaman atau usaha penyelamatan kredit.
3. Penyelesaian pembayaran kredit yang bersangkutan diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau Badan Usaha Piutang Negara (BUPN) atau telah diajukan permintaan ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

## **1. Pengertian Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah**

### **1.1 Usaha Mikro**

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM: usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, yaitu:

1. Total aset yang dimiliki maksimal Rp 50.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Omset maksimal Rp 300.000.000 per bulan

### **1.2. Usaha Kecil**

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM : Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik

langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini, yaitu :

1. Total aset yang dimiliki  $>$  Rp 50.000.000 – Rp 500.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Omset  $>$  Rp 300.000.000 – Rp 2.500.000.000 per bulan.

### 9.3. Usaha Menengah

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM : Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini.

1. Total aset yang dimiliki  $>$  Rp 500.000.000 – Rp 10.000.000.000
2. Omset  $>$  Rp 2.500.000.000 – Rp 50.000.000.000 per bulan.

## 2. Penyebab Kredit Macet

Munculnya kredit macet pada dasarnya tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi melalui suatu proses. Menurut Kasmir (2010:155) terjadinya kredit macet dapat disebabkan oleh pihak kreditur maupun oleh pihak debitur.

Menurut Kasmir (2010:155) faktor penyebab kredit macet yang diakibatkan karena kelalaian pihak kreditur antara lain:

1. Keteledoran pihak bank dalam menjalankan peraturan pembiayaan kredit yang telah ditetapkan.

2. Terlalu mudah dalam memberikan kredit,yang disebabkan karena tidak adanya patokan yang jelas tentang standard kelayakan permintaan kredit yang diajukan.
3. Konsentrasi dana kredit pada sekelompok debitur atau sektor usaha yang beresiko tinggi.
4. Kurang memadainya jumlah personel eksekutif dan staff bagian kredit yang berpengalaman.
5. Lemahnya bimbingan dan pengawasan pimpinan kepada para eksekutif dan staff bagian kredit.
6. Jumlah kredit yang diberikan melampaui batas kemampuan bank.
7. Lemahnya kemampuan bank dalam mendeteksi kemungkinan timbulnya kredit bermasalah,termasuk mendeteksi arah perkembangan arus kas (cash flow) dari sidebitur.

Sedangkan faktor penyebab kredit macet yang diakibatkan karena kesalahan pihak debitur menurut Kasmir (2010:155) adalah :

1. Adanya salah urus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan atau karena kurang berpengalaman dalam menjalankan bidang usaha yang mereka geluti.
2. Adanya masalah didalam keluarga,misalnya:perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan atau adanya pemborosan dana yang dilakukan oleh salah satu atau beberapa anggota keluarga dari sidebitur.
3. Kegagalan debitur dalam menjalankan bidang usaha mereka yang lain.
4. Kesulitan likuiditas keuangan yang serius yang dialami oleh debitur.

5. Munculnya kejadian diluar kontrol atau kendali debitur, seperti terjadi perang dan bencana alam.
6. Adanya watak buruk dari debitur yang dari semula memang telah merencanakan tidak akan mengembalikan sebagian maupun seluruh kredit yang telah diterimanya.

## **11. Mencegah Dan Mengatasi Kredit Macet**

### **11.1. Mencegah Kredit Macet**

Beberapa hal penting yang harus dilakukan oleh bank untuk mencegah atau mengurangi seminimal mungkin terjadinya kredit macet adalah :

#### **1. Melakukan Penilaian atau Analisis Terhadap Permohonan Kredit**

Setiap permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur, harus dilakukan penilaian secara seksama oleh pihak bank. Terlebih lagi untuk pemberian kredit jangka panjang. Karena semakin lama jangka waktu kredit, maka semakin tinggi faktor ketidakpastiannya, sehingga semakin besar pula resiko kredit macet yang dihadapi oleh bank.

#### **2. Pemantauan Penggunaan Kredit**

Setelah bank memberikan kredit kepada debiturnya, bukan berarti bahwa tugas bank sebagai perantara keuangan selesai sampai disitu, melainkan itulah awal tugas bank yang sesungguhnya dalam penyaluran kredit. Bank senantiasa harus memantau kredit yang telah disalurkan. Apakah debitur benar-benar menggunakan kreditnya sesuai dengan permohonan sebelumnya atau malah digunakan untuk keperluan yang lain. Bagaimana perkembangan dan prospek usaha debitur? Bagaimana keadaan perekonomian Nasional secara keseluruhan,

kondusif atau tidak bagi perkembangan usaha debitur? Dan pertanyaan-pertanyaan lain yang berkaitan dengan prospek kredit yang telah disalurkan oleh bank. Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk dijawab, dalam rangka mengantisipasi kemungkinan macetnya kredit yang telah disalurkan.

### 3. Jaminan Kredit

Jaminan kredit (collateral) sebenarnya tiaklah mutlak sifatnya, tetapi perlu, guna mengantisipasi kemungkinan tidak tertagihnya kredit yang disalurkan oleh bank. Disamping status dan kondisi jaminan.

#### 11.2. Mengatasi Kredit Macet

Untuk mengatasi kredit macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak sampai menimbulkan kerugian. Penyelamatan dapat dilakukan dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu pembayaran atau jumlah angsuran terutama bagi debitur yang terkena musibah dan dengan melakukan penyitaan agunan bagi debitur yang sengaja tidak mau membayar kreditnya. Menurut Kasmir (2008:128) penyelamatan terhadap kredit macet dapat dilakukan dengan beberapa metode yaitu

##### 1. Rescheduling

Merupakan upaya pertama dari pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikannya kepada debitur. Cara ini dilakukan jika ternyata pihak debitur (berdasarkan hasil penelitian dan penghitungan yang dilakukan oleh pihak bank) tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran kembali angsuran pokok maupun bunga kredit. Dalam hal ini penjadwalan ulang dilakukan untuk sebagian atau seluruh kewajiban debitur.

## 2. Reconditioning

Merupakan usaha yang dilakukan oleh pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikannya dengan cara mengubah sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan) yang semula disepakati bersama pihak debitur dan dituangkan dalam perjanjian kredit (PK). Perubahan kondisi kredit dibuat dengan memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi oleh debitur dalam melaksanakan proyek atau bisnis tersebut.

## 3. Restructuring

Merupakan usaha penyelamatan kredit yang terpaksa dilakukan oleh bank dengan cara mengubah komposisi pembiayaan yang mendasari pemberian kredit. Pembiayaan suatu proyek atau bisnis tidak seluruhnya berasal dari modal sendiri, tetapi sebagian besar dibiayai dengan kredit yang diperoleh dari bank.

## 4. Kombinasi 3 R

Dalam rangka penyelamatan kredit bermasalah (rescue program) bila dianggap perlu bank dapat melakukan berbagai kombinasi tindakan rescheduling, reconditioning dan restructuring tersebut diatas yaitu :

- Rescheduling dan reconditioning
- Rescheduling dan restructuring
- Restructuring dan reconditioning
- Rescheduling, reconditioning dan restructuring

## 5. Eksekusi

Jika semua usaha penyelamatan seperti yang telah diuraikan diatas sudah dicoba, namun debitur masih juga tidak mampu memenuhi kewajibannya terhadap bank, maka usaha terakhir yang dilakukan adalah melakukan eksekusi melalui berbagai cara, antara lain :

- Menyerahkan kewajiban kepada Badan Urusan Piutang Negara (BUPN).
- Menyerahkan perkara ke pengadilan negeri.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut Sugijono (2010:53) penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat atau menghubungkan dengan variabel lain.

##### B. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian secara langsung pada objek penelitian, yaitu pada **PT. BANK BTPN, Tbk UNIT DELI TUA**, Jalan Pasar Baru No 1A Kec. Deli Tua, Kab. Deli Serdang, Prov Sumatera Utara.

##### C. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan Juni 2016 sampai dengan bulan September 2016.

**Tabel 2.1. Waktu Penelitian Skripsi**

Jenis Kegiatan	Juli 2016				Agust 2016				Sept 2016				Okt 2016			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pra Survey	■															
Pengajuan Judul	■	■														
Konsultasi&Bimbingan			■	■	■	■										
Penyusunan&Bimbingan Propo			■	■	■	■										
Penyusunan&Bimbingan Skrip									■	■	■	■				
Sidang Skripsi													■	■	■	■

#### **D. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk informasi, baik lisan maupun tulisan. Data diperoleh dari wawancara dan informasi.

#### **E. Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

##### **1. Data Primer**

Data diperoleh secara langsung dari instansi yang diteliti melalui pengamatan atau observasi. Data yang dikumpulkan bersifat kualitatif.

##### **2. Data Sekunder**

Data yang dikumpulkan oleh penulis dari dokumen-dokumen dan arsip yang ada pada perusahaan yang diteliti.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis melakukan dua metode penelitian.

##### **a. Observasi**

Yaitu penulis melakukan pengamatan langsung pada PT. Bank BTPN, Tbk Unit Deli Tua, dengan tujuan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.

##### **b. Wawancara**

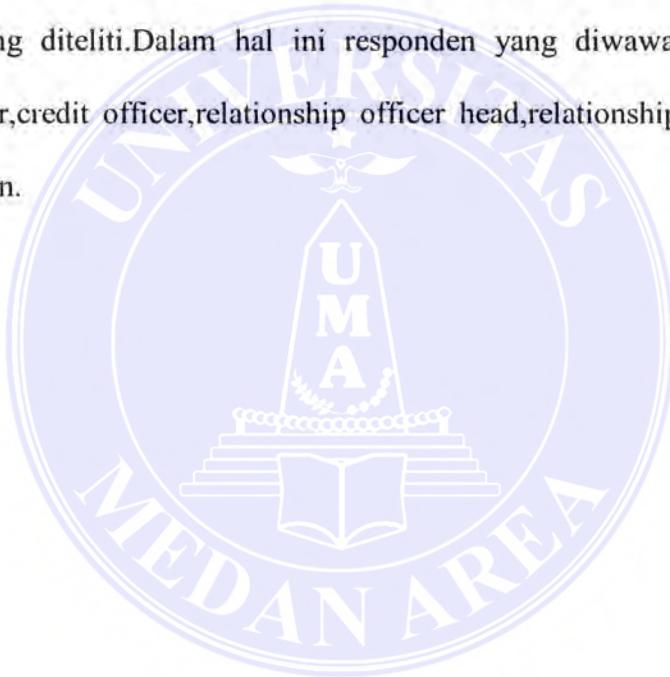
Yaitu dengan melakukan tanya jawab dengan pihak yang berwenang pada objek penelitian secara langsung untuk memperoleh data yang sesuai.

c. Dokumentasi

Yaitu dengan mengumpulkan data-data dan informasi melalui buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah, internet dan literatur lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian.

**G. Responden**

Dalam pengumpulan data, cara yang digunakan oleh penulis adalah dengan mengumpulkan data dan juga melakukan wawancara dari responden dari perusahaan yang diteliti. Dalam hal ini responden yang diwawancarai adalah branch manager, credit officer, relationship officer head, relationship anchor head dan kredit admin.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Secara umum, sistem pemberian kredit yang dilaksanakan oleh PT. Bank BTPN Unit Deli Tua terdiri atas beberapa prosedur yaitu prosedur permohonan kredit, prosedur penyelidikan dan analisis kredit, prosedur persetujuan permohonan kredit, prosedur pencairan fasilitas kredit, dan prosedur pelunasan fasilitas kredit.
2. PT Bank BTPN Unit Deli Tua Selalu selektif dan berhati-hati dalam memberikan kredit kepada debitur untuk mencegah terjadinya kredit macet dikemudian hari. Hal ini telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit.
3. Sistem pemberian kredit yang dilaksanakan oleh PT Bank BTPN Unit Deli Tua tersebut diatas telah didukung oleh penerapan sistem pengendalian internal yang bertujuan untuk tercapainya pemberian kredit yang positif, dan telah memenuhi lima elemen sistem pengendalian internal yaitu: lingkungan pengendalian, penafsiran resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.
4. Hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan PT. Bank BTPN Unit Deli Tua untuk menyetujui pengajuan suatu pembiayaan antara lain kelengkapan administrasi atau persyaratan pembiayaan oleh nasabah, jumlah nominal pengajuan pembiayaan dan rencana penggunaan dana tersebut, karakter, kemauan dan kemampuan nasabah mengangsur pinjaman, nasabah

lulus survei yang diadakan PT Bank BTPN Unit Deli Tua, jaminan yang nominalnya sebanding dengan jumlah pinjaman yang diajukan.

5. Faktor yang menjadi penyebab kredit macet ada dua, antara lain: faktor internal (PT Bank BTPN Tbk) dan faktor eksternal (dari sisi debitur). Faktor internal disebabkan adanya oknum pegawai PT. Bank BTPN Tbk Unit Deli Tua yang tidak bertanggung jawab dalam menjalankan prosedur pemberian kredit. Sedangkan faktor eksternal disebabkan antara lain penggunaan dana kredit yang tidak sesuai dengan tujuan penggunaan yang semula dan usaha debitur yang mengalami kemunduran.
6. Adanya prosedur pemberian kredit yang jelas serta sistem pengendalian internal pemberian kredit yang sangat efektif pada PT. Bank BTPN Unit Deli Tua menjadi sebuah bukti nyata atas usaha PT. Bank BTPN Tbk untuk mencapai visi dan misinya, serta menjadi alasan bagi calon debitur memilih PT. Bank BTPN Tbk untuk memfasilitasi kebutuhan mereka di bidang perkreditan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam hal penafsiran risiko (risk assessment), sebaiknya PT. Bank BTPN Unit Deli Tua tidak hanya melakukan penafsiran risiko dalam hal kemungkinan salah saji laporan keuangan, tetapi sebaiknya menetapkan sebuah mekanisme khusus untuk mengetahui dan menelusuri ketidakwajaran yang terjadi dengan nasabah atau debitur maupun pihak luar lainnya baik dalam hal operasional,

keuangan maupun ketaatan terhadap kebijakan yang berlaku karena hal ini dapat berpengaruh terhadap efektifitas pemberian kredit secara keseluruhan.

2. Penulis menyarankan PT Bank BTPN Tbk lebih berinovasi dan membuat program-program yang dibutuhkan oleh nasabah, debitur ataupun masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

- John Simon(2010)*Bekerja di Bank Itu Mudah*. Jakarta:Penerbit Gramedia Pustaka Utama
- Sistem Informasi Akuntansi* jilid 1.Jakarta :Penerbit Salemba Empat
- Halomoan Situmorang(2012) *Pemeriksaan Akuntansi I*.Medan.
- Mulyadi (2008).*Auditing*(edisi 6)Jakarta :Penerbit Salemba Empat.
- Kasmir (2011).*Dasar-dasar Perbankan*.Jakarta:Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- Arents Randal J. Elder dan Mark S.Basley (2006) *Auditing dan Jasa Asuransi* (edisi 12)Jakarta:Penerbit Erlangga.
- Triandaru,Sigit & Totok Budisantoso (2010) *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*.Jakarta:Penerbit Salemba Empat
- Dahlan Siamat (1993) *Manajemen Bank Umum*. Jakarta: Penerbit Intermedia.
- Kasmir (2010) *Manajemen Perbankan*.Jakarta:Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- Kashmir (2011) *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*. edisi revisi cetakan kesebelas.Jakarta.:Penerbit Rajawali Pers.
- Sugiyono (2008) *Metode Penelitian Pendidikan*.Bandung:Penerbit Alfabeta.